

**ANALISIS KINERJA KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
(Studi Kasus Pada PT. PELINDO III KUPANG)**

Yane Alice Doce

Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Kupang.

Zainudin Adang Djaha

Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

Email:zainudin.ibnu@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Pajak Daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan Lain – Lain Pendapatan Asli daerah yang sah Terhadap Rata – Rata Pendapatan Asli daerah ($PAD_{rata-rata}$) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang, bagaimana kinerja pertumbuhan Pajak Daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan Lain – Lain Pendapatan Asli daerah yang sah Terhadap Total Pendapatan Asli daerah (PAD_{Total}) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif yakni penulis mengolah data keuangan dengan rumus selanjutnya dilakukan penjelasan dalam bentuk narasi berdasarkan hasil perhitungan

Kinerjan komponen Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2013 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki kinerja *paling buruk*, kinerjan komponen Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2014 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan memiliki *kinerja cukup*. Sedangkan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki kinerja *paling buruk*, kinerjan komponen Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2015 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki *kinerja cukup*

Kata Kunci : *Kinerja, komponen, PAD*

PENDAHULUAN

Hal yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan pungutan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak galian golongan C dan pungutan retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pungutan ini tentunya akan memberikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu informasi tentang besarnya kontribusi dari pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting karena dapat menunjukkan kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk mengoptimalkan potensi PAD. Karena kondisi tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul *Analisis Kinerja Komponen Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata*

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Pajak Daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan Lain – Lain Pendapatan Asli daerah yang sah Terhadap Rata – Rata Pendapatan Asli daerah ($PAD_{rata-rata}$) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata

2. Bagaimana kinerja pertumbuhan Pajak Daerah , retribusi daerah, bagian laba BUMD dan Lain – Lain Pendapatan Asli daerah yang sah Terhadap Total Pendapatan Asli daerah(PAD_{Total}) pada Pemerintah Kabupaten Lembata

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status kinerja Pajak Daerah , retribusi daerah, bagian laba BUMD dan Lain – Lain Pendapatan Asli daerah yang sah Terhadap Rata – Rata Pendapatan Asli daerah ($PAD_{rata-rata}$) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
2. Untuk mengetahui kinerja pertumbuhan Pajak Daerah , retribusi daerah, bagian laba BUMD dan Lain – Lain Pendapatan Asli daerah yang sah Terhadap Total Pendapatan Asli daerah (PAD_{Total}) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata

TINJAUAN PUSTAKA

1. Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Bastian (2001: 92) mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan.

Halim (2007: 230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu : pertama, semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan kedua, kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya.

2. Sumber - Sumber Penerimaan Daerah

Saragih (2003 : 93) menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Pada sisi penerimaan dalam APBD termuat beberapa sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu: Sisa Anggaran Tahun Lalu, Bagian Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sisa anggaran tahun lalu adalah penerimaan daerah dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang telah dituangkan dalam APBD namun tidak direalisasikan dengan baik karena penghematan dari belanja atau adanya pos pengeluaran belanja yang tidak

dilaksanakan.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan sebagai barometer bagi potensi perekonomian suatu daerah, sekaligus pencerminan efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber keuangannya sendiri seoptimal mungkin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian karena semua pembiayaan daerah belum mampu dibiayai dengan PAD, maka dana perimbangan atau dana transfer pusat dan pinjaman daerah masih merupakan sumber – sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pembangunan daerah.

3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, potensi PAD adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD.

Saragih (2003: 32) menyatakan bahwa dari tahun ke tahun kebijakan mengenai PAD di setiap daerah propinsi, kabupaten, dan kota relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber utama PAD komponennya hanya terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD, dan lain-lain PAD yang sah

3.1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dari definisi di atas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali, dan ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

3.2.4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

4. Analisis Status Kinerja Komponen PAD

Menurut Sumardi (2011 : 135) bahwa analisis status kinerja komponen PAD dimaksudkan untuk mengetahui kinerja masing – masing komponen PAD yang didasarkan pada dua indikator yaitu rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan. Rasio kontribusi merupakan perbandingan antara nilai masing – masing komponen terhadap Rata – rata komponen PAD, sedangkan rata – rata komponen PAD merupakan total nilai raelisasi PAD dibagi dengan empat komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain –

lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya Menurut Sumardi (2011 : 135) rasio pertumbuhan merubakan perbandingan antara pertumbuhan pertumbuhan komponen PAD dengan pertumbuhan total PAD

Menurut Sumardi (2011 : 137) untuk menentukan rasio kontribusi perkomponen dapat dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Komponen PAD}_i}{\text{Komponen PAD}_{\text{rata-rata}}}$$

Selanjutnya untuk menentukan rasio pertumbuhan komponen PAD dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\Delta \text{PAD}_i}{\Delta \text{PAD}_{\text{Total}}}$$

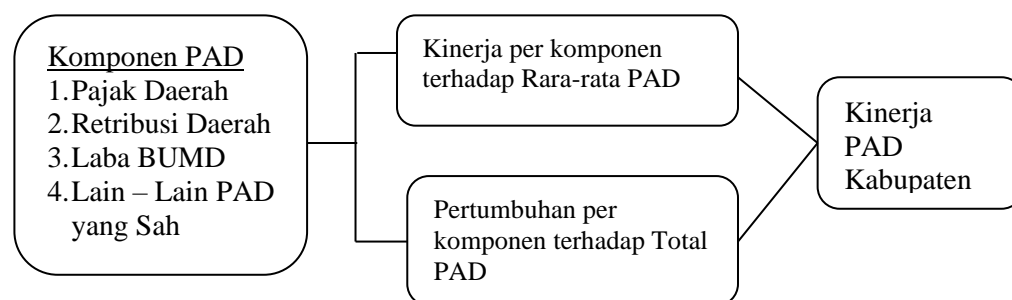
Berdasarkan kedua indicator di atas, maka menurut Sumardi (2011 : 135) status kinerja komponen PAD dapat dibedakan menjadi 4 kategori antara lain :

1. Prima = status kinerja Ideal, komponen rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan PAD > 1
 2. Berkembang = status kinerja Cukup, komponen rasio kontribusi PAD ≤ 1 dan rasio pertumbuhan > 1
 3. Potensial = status kinerja Cukup, komponen rasio kontribusi memiliki kontribusi > 1 dan rasio pertumbuhan ≤ 1
- Terbelakang = status kinerja paling buruk, komponen PAD memiliki rasio kontribusi ≤ 1 dan rasio pertumbuhan ≤ 1

5. Kerangka Berpikir

Pengetahuan tentang status kinerja komponen PAD dan kinerja pertumbuhan komponen PAD menjadi hal yang penting. Semakin baik kinerja perkomponen PAD terhadap rata – rata PAD dan semakin baik kinerja pertumbuhan perkomponen PAD terhadap Total PAD maka akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar. Untuk mengetahui hubungan status kinerja perkomponen PAD dan kinerja pertumbuhan PAD maka dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengambilan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah teknik dokumentasi yakni peneliti mengumpulkan dokumen seperti laporan APBD, laporan realisasi APBD dan catatan atas laporan keuangan selanjutnya dipelajari untuk digunakan dalam analisis hasil

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif yakni penulis mengolah data keuangan dengan rumus selanjutnya dilakukan penjelasan dalam bentuk narasi berdasarkan hasil perhitungan. Rumus yang digunakan untuk analisis data penelitian sebagai berikut :

2.1 Analisis Kontribusi komponen PAD Terhadap PAD rata-rata

Untuk melakukan analisis kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD rata-rata) dapat dihitung dengan formulasi berikut ini :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Komponen PAD}_i}{\text{Komponen PAD}_{\text{rata-rata}}}$$

(Sumber : Sumardi 2011 : 136)

2.2 Analisis Rasio Pertumbuhan Komponen PAD Terhadap PAD Total

Untuk melakukan analisis Rasio Pertumbuhan Komponen PAD Terhadap PAD_{Total} maka dapat dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\Delta \text{PAD}_i}{\Delta \text{PAD}_{\text{Total}}}$$

(Sumber : Sumardi 2011 : 137)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Kontribusi Komponen Pendapatan Asli daerah

1.1 Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah , maka selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Rasio Kontribusi Pajak daerah

No	Komponen PAD	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Rasio Pajak Daerah	0.60	0.84	1.16	1.40

Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2016

Hasil analisis rasio kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2012 mencapai 0,60 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,30 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup , tahun 2013 mencapai 0,84 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,84 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup , tahun 2014 mencapai 1,16 dalam kategori potensial dengan criteria $1,16 > 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup dan untuk tahun 2015 rasionya mencapai 1,40 dalam kategori berkembang dengan criteria $1,40 > 1$ dengan status kinerjanya dinilai berkembang, sedangkan rasio pajak daerah rata – rata untuk tahun 2012-

2015 mencapai 1,00 dalam kategori berkembang dengan criteria $1.00 > 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup.

1.2 Analisis Rasio kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui rasio kontribusi retribusi daerah, maka selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Perhitungan Rasio Retribusi Daerah

No	Komponen PAD	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
2	Rasio Retribusi Daerah	0.70	0.88	1.14	1.28

Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2016

Hasil analisis rasio kontribusi Retribusi Daerah untuk tahun 2012 mencapai 0,70 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,70 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup , tahun 2013 mencapai 0,88 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,88 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup , tahun 2014 mencapai 1,14 dalam kategori prima dengan criteria $1,14 > 1$ dengan status kinerjanya dinilai Ideal dan untuk tahun 2015 rasionya mencapai 1,28 dalam kategori prima dengan criteria $1,14 > 1$ dengan status kinerjanya dinilai Ideal.

1.3 Analisis Rasio kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui rasio kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah, maka selanjutnya dapat ditunjukkan hasil perhitungan dalam tabel berikut ini :

Rasio Kontribusi Laba BUMD

No	Komponen PAD	Tahun				Rata - Rata
		2012	2013	2014	2015	
3	Rasio Laba BUMD	0.80	0.91	1.02	1.28	1.00

Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2016

Hasil analisis rasio kontribusi hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan untuk tahun 2012 mencapai 0,80 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,80 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup , tahun 2013 mencapai 0,91 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,91 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup , tahun 2014 mencapai 1,02 dalam kategori prima dengan criteria $1,02 > 1$ dengan status kinerjanya dinilai Ideal dan untuk tahun 2015 rasionya mencapai 1,28 dalam kategori prima dengan criteria $1,28 > 1$ dengan status kinerjanya dinilai Ideal

1.4 Analisis Rasio kontribusi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui rasio kontribusi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maka selanjutnya dapat ditunjukkan hasil perhitungan dalam tabel berikut ini :

Perhitungan Rasio kontribusi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Komponen PAD	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
4	Rasio Lain -Lain PAD yang Sah	0.95	0.73	0.72	1.60

Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2016

Hasil analisis rasio kontribusi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk tahun 2012 mencapai 0,95 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,95 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup , tahun 2013 mencapai 0,73 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,73 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup , tahun 2014 mencapai 0,72 dalam kategori berkembang dengan criteria $0,72 \leq 1$ dengan status kinerjanya dinilai cukup dan untuk tahun 2014 rasionya mencapai 1,60 dalam kategori prima dengan criteria $1,60 > 1$ dengan status kinerjanya dinilai Ideal

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa rasio pajak daerah dan Rasio Lain – Lain PAD yang sah untuk tahun 2015 berada dalam kategori prima, artinya realisasi penerimaan melebihi target penerimaan pajak daerah dan Lain – Lain PAD yang sah . Penerimaan pajak dan Lain – Lain PAD yang sah yang melebihi target disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, bertambahnya rumah makan dan tempat hiburan. Untuk mengetahui rasio secara keseluruhan , maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Rasio kontribusi komponen PAD
tahun 2012 – 2015

No	Komponen PAD	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Rasio Pajak Daerah	0.60	0.84	1.16	1.40
2	Rasio Retribusi Daerah	0.70	0.88	1.14	1.28
3	Rasio Laba BUMD	0.80	0.91	1.02	1.28
4	Rasio Lain -Lain PAD yang Sah	0.95	0.73	0.72	1.60

Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2016

2. Analisis Kinerja Komponen Pendapatan Asli daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 – 2015

2.1 Status kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata tahun 2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kinerja Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah dinilai paling buruk. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Status kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata tahun 2013

No	Uraian	Tahun 2013			
		Rasio PAD	Pertumbuhan PAD	Kategori	Status Kinerja
1	Pajak Daerah	$0,84 \leq 1$	$0,80 \leq 1$	Terbelakang	Paling Buruk
2	Retribusi Daerah	$0,88 \leq 1$	$0,33 \leq 1$	Terbelakang	Paling Buruk
3	Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan	$0,88 \leq 1$	$0,11 \leq 1$	Terbelakang	Paling Buruk
4	Lain -Lain PAD yang Sah	$0,88 \leq 1$	$-0,24 \leq 1$	Terbelakang	Paling Buruk

2.2 Status kinerja komponen Pendapatan Asli Kabupaten Lembata tahun 2014

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kinerja Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dinilai cukup dan lain – lain PAD yang sah dinilai paling buruk. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Status kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata tahun 2014

No	Uraian	Tahun 2014			
		Rasio PAD	Pertumbuhan PAD	Kategori	Status Kinerja
1	Pajak Daerah	1,16 > 1	0,66 ≤ 1	Potensial	Cukup
2	Retribusi Daerah	1,14 > 1	0,29 ≤ 1	Potensial	Cukup
3	Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan	1,02 > 1	0,07 ≤ 1	Potensial	Cukup
4	Lain -Lain PAD yang Sah	0,72 ≤ 1	-0,01 ≤ 1	Terbelakang	Paling Buruk

Sumber : Data sekunder di olah penulis Tahun 2016

2.3 Status kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata tahun 2015

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kinerja Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dinilai cukup dan lain – lain PAD yang sah dinilai cukup. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Status kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2015

No	Uraian	Tahun 2015			
		Rasio PAD	Pertumbuhan PAD	Kategori	Status Kinerja
1	Pajak Daerah	1,40 > 1	0,35 ≤ 1	Potensial	Cukup
2	Retribusi Daerah	1,28 > 1	0,11 ≤ 1	Potensial	Cukup
3	Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan	1,28 > 1	0,12 ≤ 1	Potensial	Cukup
4	Lain -Lain PAD yang Sah	1,60 > 1	0,42 ≤ 1	Potensial	Cukup

Sumber : Data sekunder pilihan mengunjung TAHUN 2016

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas tentang kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah tiga tahun terakhir, maka dapat disimpulkan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Status Kinerja Komponen PAD tahun 2013, 2014 dan 2015

No	Uraian	Status Kinerja		
		2013	2014	2015
1	Pajak Daerah	Paling Buruk	Cukup	Cukup
2	Retribusi Daerah	Paling Buruk	Cukup	Cukup
3	Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan	Paling Buruk	Cukup	Cukup
4	Lain -Lain PAD yang Sah	Paling Buruk	Paling Buruk	Cukup

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2016

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja komponen

Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2013 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki kinerja paling buruk, kinerjan komponen Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2014 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan memiliki kinerja cukup. Sedangkan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki kinerja paling buruk, kinerjan komponen Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2015 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki kinerja cukup

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kinerjan komponen Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2013 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki kinerja paling buruk, kinerjan komponen Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2014 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan memiliki kinerja cukup. Sedangkan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki kinerja paling buruk, kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2015 yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah memiliki kinerja cukup

2. Saran

Disarankan agar pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dapat meningkatkan penerimaan komponen Pendapatan Asli daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain – Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah sehingga status kinerja komponen PAD dapat meningkat ke status kinerja berkembang maupun status kinerja prima

REFERENSI

- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 2011, “Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Mahsun Mohamad, 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Munir Badrul, 2003, *Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*, Semawa Center, Yogyakarta
- Munir Badrul, 2003, *Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*, Semawa Center, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sugiyanto, “Kemandirian dan Otonomi Daerah”, *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XII, No. 1 Juni 2010.
- Sumardi dan Dwi Prasetyani, 2011; *Analisis Kinerja dan Potensi Pendapatan Asli Daerah*. Penerbit Cakrabooks Solo
- Yuliati, T. 2002. *Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal* [Tesis]. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.